

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. & Fahrul, S. 2018. Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018. *Journal of Governance*, III (1): 50-66.
- Ahmad, A. -. Etika dan Moral : Implementasinya dalam Profesi Dokter Gigi.
- Asshiddiqie, J. 2013. menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman: 10- 11.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and MixedMethods Approaches*. London: Sage Publication.
- Diamond, L & Eko, S. 2003. *Developing Democracy: toward consolidation*. Yogyakarta: IRE Press. hal. 3.
- Erwinsyahbana, T. 2018. Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. DOI: 10.31227/osf.io/gu59k.
- Fuadi,. 2016. Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh. *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, Nomor 3. Hal.
- Global Commision on Election, Democracy & Security. 2012. Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia.
- International IDEA. 2000. Penilaian Demokratisasi di Indonesia. Stockholm, Swedia.
- Labolo, M. 2014. *Catatan Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia, Peluang, Tantangan, dan Recovery*. Wadi Press.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. Analisa Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nikmatuniayah. 2015. Kinerja dan Etika Pelayanan Sektor Publik dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 6, No. 3. Hal: 373-384.
- Nurrahmawati. 2017. Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu (studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh pada

- Pilkada Gubernur/ Wakil Gubernur Aceh 2017). *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 1: 27-36.
- Reynolds, A. et.al. 2016. Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA (diterjemahkan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati langsung dari versi bahasa inggris buku International IDEA “Electoral System Design: The New International IDEA Handbook” tahun 2005). Stockholm : International IDEA.
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume III Nomor 1. Hal. 107.
- Sari, Yulia. 2017. Tindakan Rasional Anggota KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik. Thesis. Universitas Andalas.
- Sugihariyadi, M. & Rahardjo, J. 2015. Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis, Kepemimpinan, Integritas, Independensi dan Kompetensi Kepemiluan. *ADDIN*, Vol. 9 No. 1:107-128.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*), Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Didik. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: USAID, drsp, perludem.
- Surbakti, R. dkk. 2011. *Serial Demokrasi Elektoral Buku 13 Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R. dkk. 2014. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Surbakti, R & Nugroho, K. 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tonidaya, R.S. 2017. Model tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (perspektif

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Thesis. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Wall, Alan., dkk. 2016. Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA. Stockholm: International IDEA.
- Winardi. 2010. Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 2: 51-84.
- Yahfizham. 2012. Moral, Etika dan Hukum (Implikasi Etis dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Iqra'*, Volume 06, Nomor 01: 9-18.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- <http://aiskyu.blogspot.com/2016/03/indikator-pemilu-demokratis.html>.
- <http://dkpp.go.id/index.php?a=pengaduan&s=&hal=4>

<https://news.detik.com/berita/d-1990071/dkpp-pecat-3-anggota-kip-aceh-tenggara-karena-melanggar-kode-etik>.

<https://nasional.sindonews.com/read/690493/12/dkpp-pecat-2-anggota-kip-kabupaten-aceh-tengah-1353560701>

<https://news.detik.com/berita/d-3402645/langgar-kode-etik-pilkada-4-komisioner-kip-di-aceh-diberhentikan>.

<https://news.detik.com/berita/d-3422018/langgar-kode-etik-ketua-kip-simeulue-aceh-dinonaktifkan>.

Awaluddin.

<https://media.neliti.com/media/publications/28550-ID-konsepsi-negara-demokrasi-yang-berdasarkan-hukum.pdf>. diunduh tanggal 18 Februari 2019. Pukul 14.30 WIB.

Serambi Indonesia. Intervensi DPRA Bentuk Ancaman Bagi Kemandirian KIP. Diakses 10 November 2018 dari <http://aceh.tribunnews.com/2017/10/07/intervensi-dpra-bentuk-ancaman-bagi-kemandirian-kip>.

Beritaterkini. DKPP Hukum Anggota Panwaslih Agara dan Komisioner KIP Aceh.

<http://beritakini.co/news/tms-kan-partai-sira-bkpp-hukum-panwaslih-agara-dan-kip-aceh/index.html#> diunduh 3 Juni 2019 Pukul 00.27 WIB.

Serambi Indonesia. Serambinews.com tanggal 28 Agustus 2018 melalui website [aceh.tribunnews.com](http://aceh.tribunnews.com) tanggal 6 Juni 2019 pukul 00:27 WIB

Dilansir dari Serambinews.com tanggal 4 Oktober 2018 melalui website [aceh.tribunnews.com](http://aceh.tribunnews.com) tanggal 6 Juni 2019 pukul 00:35 WIB.

Merdeka.com. DPRA minta tahapan Pemilu 2019 tunggu putusan gugatan di MK. Tanggal 11 Oktober 2017. Didownload tanggal 17 Juli 2019, Pukul 20:13 WIB